

Memperkuat ketahanan: Pendekatan berbasis masyarakat ICRC untuk memastikan pelindungan Pendidikan

Geoff Loane dan Ricardo Fal-Dutra Santos

Geoff Loane menjabat sebagai Kepala Pendidikan di Komite Internasional Palang Merah (ICRC) pada saat artikel ini ditulis. Selama lebih dari tiga puluh tahun, beliau menempati berbagai posisi operasional baik di lapangan maupun di kantor pusat ICRC.

Ricardo Fal-Dutra Santos adalah *Protection Delegate* di Delegasi Regional Pretoria ketika artikel ini disusun. Dia sebelumnya *Associate* di Unit Pelindungan Penduduk Sipil ICRC, di mana dia bekerja untuk isu-isu pelindungan anak, termasuk akses anak-anak ke pendidikan.

Abstrak

Pendidikan kian mendapat perhatian di sektor kemanusiaan. Pada konteks yang terdampak konflik, akses ke pendidikan bisa terhambat akibat serangan terhadap dan penggunaan secara militer fasilitas-fasilitas pendidikan serta serangan dan ancaman serangan terhadap siswa, guru, dan pihak-pihak terkait Pendidikan lainnya. Penduduk yang terdampak mungkin juga tidak mendapat akses ke pendidikan, misalnya karena harus mengungsi.

Artikel ini membahas serangkaian respons kemanusiaan yang ditujukan untuk (1) memastikan pelindungan fasilitas pendidikan dan orang-orang terkait, terutama melalui upaya advokasi yang berpusat pada pemegang senjata, dan (2) membangun (kembali) layanan pendidikan di mana layanan tersebut tidak tersedia atau tidak lagi berjalan, terutama melalui program yang ditujukan untuk penduduk yang terdampak. Tulisan ini selanjutnya berargumen bahwa, berbeda dengan praktik dominan, pelindungan pendidikan juga dapat dipastikan melalui respons terprogram dengan partisipasi signifikan dari masyarakat yang terdampak, dan menelaah contoh program Sekolah yang Lebih Aman (Safer Schools) di Ukraina.

Kata kunci: pendidikan dalam situasi darurat, pelindungan pendidikan, respons berbasis komunitas, Ukraina.

Pengantar

Konflik bersenjata menghadirkan tantangan serius terhadap kesempatan anak-anak untuk mendapatkan akses ke pendidikan di lingkungan yang aman dan yang mendukung tumbuh kembang mereka. Menurut Dana Anak-anak PBB (UNICEF), ada 27 juta anak-anak keluar dari sekolah di dua puluh empat negara yang terdampak konflik pada tahun 2015.¹ Fasilitas pendidikan, para siswa dan guru secara sengaja dijadikan sasaran serangan - sering kali merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional (HHI) – atau sekolah-sekolah digunakan untuk tujuan militer oleh aktor bersenjata di tujuh puluh negara yang disurvei antara tahun 2009 dan 2013, dengan pola serangan yang signifikan yang diobservasi di tiga puluh negara.² Pendidikan juga bisa terganggu sebagai konsekuensi dari pengungsian,³ dan ketika keluarga meninggalkan rumah mereka untuk mencari pendidikan yang aman dan dapat diandalkan demi anak-anak mereka.

Dampak konflik terhadap pendidikan terutama menjadi permasalahan anak-anak dan orang tua dalam situasi kemanusiaan. Sebuah laporan yang disusun oleh Save the Children, yang menganalisis enam belas kajian yang merefleksikan suara 8.749 anak, mengungkapkan bahwa “99% anak-anak dalam situasi krisis melihat pendidikan sebagai prioritas”.⁴ Kajian ini juga mempertimbangkan suara orang tua, pengasuh dan masyarakat dari berbagai konteks, yang juga merefleksikan pemahaman pendidikan sebagai prioritas, di samping makanan, tempat tinggal dan air.⁵

Oleh karena itu, semakin jelas terlihat bahwa pendidikan tidak hanya menjadi isu penting dalam agenda pembangunan, tetapi juga merupakan kebutuhan kemanusiaan dalam konteks yang terdampak konflik. Hal ini telah mendorong peningkatan perhatian terhadap pendidikan dalam situasi darurat di forum internasional dan telah menghasilkan level respons kemanusiaan yang meningkat.

¹ 1 UN Children's Fund (UNICEF), *Education Uprooted: For Every Migrant, Refugee and Displaced Child, Education*, New York, September 2017, dapat diakses di: www.unicef.org/media/files/Education_Uprooted_DIGITAL.pdf (semua referensi internet diakses pada April 2018 kecuali dinyatakan lain).

² Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA), *Education under Attack – 2014*, New York, 2014, hal. 8, dapat diakses di: www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/eua_2014_full_0.pdf.

³ Lihat Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Missing Out: Refugee Education in Crisis*, September 2016, dapat diakses di: www.unhcr.org/57d9d01d0.

⁴ Lihat Save the Children, *What Do Children Want in Times of Crisis? They Want an Education*, Juni 2015, hal. 1 dan 16, dapat diakses di: www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/WHAT_DO_CHILDREN_WANT1.PDF.

⁵ *Ibid.*, hal. 11.

Bagian pertama artikel ini mengajukan argumen bahwa kurangnya atau terganggunya pendidikan merupakan permasalahan kemanusiaan dalam dua cara spesifik. Cara pertama fokus pada isu “pelindungan pendidikan dari serangan”, termasuk pelindungan fasilitas pendidikan dari serangan dan penggunaan secara militer,⁶ serta pelindungan siswa, guru dan orang-orang terkait pendidikan lainnya dari serangan dan ancaman serangan. Cara kedua menyangkut kurangnya akses pendidikan bagi penduduk yang terdampak konflik dan kekerasan, misalnya karena pengungsian. Sementara pendekatan pertama fokus pada dampak terhadap infrastruktur pendidikan yang ada, pendekatan kedua melihat area di mana infrastruktur tersebut tidak ada atau tidak dapat diakses.

Terbukti, ketidakamanan itu sendiri, termasuk tantangan terhadap pelindungan pendidikan dari serangan (permasalahan pertama), dapat menjadi alasan mengapa pendidikan tidak dapat diakses (permasalahan kedua); namun, respons terhadap isu-isu ini juga bervariasi, yang membuat perbedaan di antara keduanya semakin jelas. Serangkaian respons pertama fokus pada upaya untuk memastikan pelindungan fasilitas pendidikan dan orang-orang yang terkait pendidikan. Pendekatan ini terutama bersifat preventif, dan seperti yang akan ditunjukkan, sebagian besar telah diterjemahkan ke dalam upaya yang menyasar otoritas dan pemegang senjata, terutama melalui advokasi atau dialog. Di sisi lain, serangkaian respons kedua – yaitu, untuk mengatasi kurangnya akses ke pendidikan – difokuskan pada membangun atau membangun kembali layanan pendidikan di mana layanan tersebut tidak ada atau tidak berjalan lagi. Pendekatan ini sebagian besar bersifat remedial/perbaikan, dan di sini disampaikan bahwa hal tersebut telah menjadi bidang yang paling menonjol untuk proliferasi program kemanusiaan, terutama oleh mereka yang berada di sub-sektor kemanusiaan bidang pendidikan dalam situasi darurat (EiE/*education in emergencies*), yang menyasar penduduk yang tidak memiliki akses ke pendidikan akibat konflik dan kondisi darurat lainnya.

Namun demikian, seperti yang akan dikemukakan, meskipun fokus pada isu minimnya akses ke pendidikan, sub-sektor EiE juga memberikan fondasi bagi respons program untuk memastikan pelindungan pendidikan dari serangan, sebuah wilayah yang didominasi oleh upaya-upaya yang berpusat pada otoritas dan yang berorientasi pada advokasi atau dialog.

⁶ Tidak ada ketentuan HHI yang secara khusus melarang penggunaan secara militer atas sekolah, tetapi penggunaan tersebut harus dilakukan asesmen dengan mempertimbangkan kewajiban menurut HHI yang mengharuskan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk mengambil semua tindakan pencegahan yang ditempuh untuk melindungi penduduk sipil dan objek sipil yang berada di bawah kendali mereka terhadap dampak serangan.

Bagian kedua dari makalah ini mengeksplorasi beberapa contoh operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dalam konteks konflik yang mendukung pendidikan serta mengatasi masalah pelindungan pendidikan dari serangan sekaligus kurangnya akses ke pendidikan. Terakhir, respons program ICRC untuk memastikan pelindungan pendidikan dari serangan melalui studi kasus program *Safer Schools* di Ukraina akan ditelaah. Fokus khusus akan diberikan pada nilai dari melibatkan penduduk yang terdampak dalam respons berbasis komunitas semacam itu.

Pendidikan sebagai permasalahan kemanusiaan

Pada bagian ini disampaikan bahwa kebutuhan pendidikan biasanya direspon melalui dua pendekatan berbeda. Yang pertama fokus pada serangan terhadap dan penggunaan secara militer fasilitas pendidikan dan serangan dan ancaman terhadap orang-orang yang terkait pendidikan, seperti para siswa dan guru. Yang kedua menyangkut kurangnya akses ke layanan pendidikan, yang menjadi tidak ada atau tidak berjalan karena konflik dan kekerasan.

Pendekatan pertama memunculkan respons yang fokus pada memastikan pelindungan pendidikan dengan mengurangi dampak konflik terhadap sistem pendidikan yang ada serta memastikan keselamatan siswa dan tenaga pendidikan. Di sisi lain, respons terhadap minimnya akses ke pendidikan sebagian besar fokus pada pembangunan atau pembangunan kembali layanan pendidikan bagi penduduk yang terdampak konflik bersenjata (dan keadaan darurat lainnya).

Oleh karena itu, artikel ini pertama-tama akan mengeksplorasi perkembangan agenda internasional seputar pelindungan pendidikan, di mana upaya untuk mencegah atau mengurangi serangan terhadap pendidikan menyasar terutama Negara-negara dan kelompok-kelompok bersenjata non-negara dan fokus pada perilaku permusuhan. Setelah itu, tulisan ini akan mengeksplorasi kemunculan EiE sebagai sub-sektor kemanusiaan, dengan fokus untuk menjembatani kesenjangan dalam penyediaan pendidikan. Terakhir, artikel ini akan membahas respons program yang terinspirasi oleh sub-sektor EIE untuk menjamin pelindungan pendidikan. Respon-respons program ini menjadi pelengkap rangkaian kegiatan kemanusiaan yang dapat mengatasi isu pelindungan pendidikan dari serangan dengan menambahkan opsi yang bersifat program kepada upaya-upaya yang berpusat pada otoritas dan yang berbasis advokasi atau dialog yang sudah ada. Pada saat yang sama, respons ini juga melengkapi berbagai kegiatan program yang menyasar pendidikan di sektor kemanusiaan dengan menambahkan pendekatan preventif, yang terfokus pada pelindungan

pendidikan dari serangan, kepada pendekatan perbaikan (remedial) yang ada, yang difokuskan pada pemulihan akses ke pendidikan.

Isu yang semakin menjadi perhatian internasional: pelindungan pendidikan dalam situasi konflik

Di samping pelindungan yang diberikan kepada pendidikan berdasarkan HHI, dalam beberapa dekade terakhir inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) semakin gencar untuk memperkuat pelindungan pendidikan dalam situasi konflik. Pada tahun 1994, Graça Machel, mantan menteri pendidikan Mozambik, ditunjuk untuk melakukan studi tentang dampak konflik bersenjata terhadap anak-anak.⁷ Laporan yang dihasilkan menyoroti bidang-bidang utama di mana anak-anak terkena dampak konflik bersenjata, termasuk pendidikan.⁸ Laporan tersebut membahas risiko yang ditimbulkan konflik bersenjata terhadap pendidikan, akibat kerusakan yang dialami sekolah dan kesulitan untuk mempertahankan layanan pendidikan formal tetap berjalan, dan mengobservasi tantangan dan peluang dalam memastikan akses anak-anak ke pendidikan pada saat konflik.⁹

Sementara beberapa rekomendasi laporan tersebut merefleksikan perspektif yang difokuskan pada menjembatani kesenjangan dalam akses pendidikan, seperti yang akan dibahas di bawah ini,¹⁰ rekomendasi pertamanya menyerukan pelindungan yang lebih aktif atas fasilitas pendidikan dari penargetan (sasaran serangan).¹¹ Persis di seputar alasan pelindungan pendidikan inilah agenda perdamaian dan keamanan PBB untuk anak-anak dikembangkan, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Pada tahun 1997, Resolusi 51/77 Majelis Umum PBB menetapkan mandat Perwakilan Khusus tentang dampak konflik bersenjata terhadap anak-anak, dan memasukkan permintaan kepada Perwakilan Khusus untuk menyiapkan laporan tahunan tentang situasi anak-anak yang terdampak konflik bersenjata.¹² Dua tahun kemudian, pada tahun 1999, Dewan Keamanan

⁷ *Impact of Armed Conflict on Children: Note by the Secretary-General*, UN Doc. A/51/306, 26 Agustus 1996, paragraf 1, dapat diakses di: www.un.org/documents/ga/docs/51/plenary/a51-306.htm. Lihat juga Kantor Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Anak-anak dan Konflik Bersenjata (SRSG-CAAC), "Timeline", dapat diakses di: <https://childrenandarmedconflict.un.org/about-us/mandate/history/>.

⁸ *Impact of Armed Conflict on Children: Report of the Expert of the Secretary-General, Ms. Graça Machel, Submitted Pursuant to General Assembly Resolution 48/157*, catatan kaki 7 di atas.

⁹ *Ibid.*, paragraf 186-202

¹⁰ *Ibid.*, paragraf 203(a). Hal ini terutama terjadi sehubungan dengan rekomendasi tentang penyediaan kesempatan pendidikan bagi anak-anak pengungsi lintas batas dan pengungsi dalam negeri (paragraf 203(d)), dan tentang mendukung pembentukan kembali dan kesinambungan pendidikan (paragraf 203(e)).

¹¹ *Ibid.*

¹² SRSG-CAAC, catatan kaki 7 di atas; Resolusi Majelis Umum PBB 51/77, 20 Februari 1997, paragraf 36-37, dapat diakses di: www.un.org/documents/ga/res/51/ares51-77.htm.

PBB (DK PBB) mengadopsi Resolusi 1261 – resolusi DK PBB pertama tentang anak-anak dan konflik bersenjata.¹³ Resolusi 1261 secara efektif “menempatkan isu anak-anak yang terdampak perang dalam agenda Dewan Keamanan”¹⁴ dan mengidentifikasi dan mengutuk pelanggaran berat terhadap anak-anak pada saat konflik, termasuk “serangan terhadap objek yang dilindungi oleh hukum internasional … seperti sekolah dan rumah sakit”.¹⁵ Hal ini juga dibingkai pelindungan, kesejahteraan dan hak-hak anak-anak selama konflik sebagai masalah perdamaian dan keamanan,¹⁶ yang ditegaskan kembali dalam istilah yang lebih jelas setahun kemudian oleh Resolusi DK PBB 1314.¹⁷

Selanjutnya, pada tahun 2005, Resolusi 1612 DK PBB membentuk Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan (MRM/*Monitoring and Reporting Mechanism*) dan Kelompok Kerja Dewan Keamanan untuk Anak-anak,¹⁸ yang “menetapkan saluran untuk menghubungkan informasi [tentang pelanggaran berat terhadap anak-anak] yang dikumpulkan di tingkat negara dengan pelaporan ke Dewan Keamanan dan organisasi lain yang dapat menekan pelaku untuk mematuhi hak-hak dan standar pelindungan anak internasional”.¹⁹ Salah satu dari enam pelanggaran berat terhadap anak-anak yang akan dipantau oleh mekanisme tersebut adalah penyerangan terhadap sekolah dan rumah sakit.²⁰

Satu batu pijakan yang lebih terkini dalam konsolidasi pendidikan sebagai isu dalam agenda perdamaian dan keamanan PBB untuk anak-anak adalah adopsi Resolusi DK PBB 1998, yang meminta Sekretaris Jenderal untuk membuat daftar pihak-pihak dalam konflik bersenjata yang terlibat dalam “serangan berulang terhadap sekolah dan/atau rumah sakit” serta “serangan berulang atau ancaman serangan terhadap orang-orang yang dilindungi sehubungan dengan sekolah dan/atau rumah sakit dalam situasi konflik bersenjata”.²¹ Resolusi tersebut juga

¹³ Resolusi DK PBB 1261, 30 Agustus 1999, Butir 2, dapat diakses di: [http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=S/RES/1261\(1999\)&Lang=E](http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=S/RES/1261(1999)&Lang=E).

¹⁴ SRSG-CAAC, catatan kaki 7 di atas.

¹⁵ Resolusi DK PBB 1261, catatan kaki 13 di atas.

¹⁶ *Ibid.*, Butir 16.

¹⁷ Resolusi DK PBB 1314, 11 Agustus 2000, Butir 9, dapat diakses di: [http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=S/RES/1314\(2000\)&Lang=E](http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=S/RES/1314(2000)&Lang=E).

¹⁸ Resolusi DK PBB 1612, 26 Juli 2005, dapat diakses di: [http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/RES/1612\(2005\)&Lang=E](http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/RES/1612(2005)&Lang=E).

¹⁹ UNICEF dan SRSG-CAAC, *Machel Study 10-Year Strategic Review: Children and Conflict in a Changing World*, New York, April 2009, halaman 86.

²⁰ Lima pelanggaran berat lainnya adalah pembunuhan atau melukai anak-anak; merekrut atau menggunakan tentara anak; pemeriksaan atau kekerasan seksual berat lainnya terhadap anak-anak; penculikan anak; dan penolakan akses kemanusiaan untuk anak-anak. Lihat *Children and Armed Conflict: Report of the Secretary-General*, UN Doc. A/59/695-S/2005/72, 9 Februari 2005, paragraf 68, dapat diakses di: <http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/59/695&Lang=E>.

²¹ Resolusi DK PBB 1998, UN Doc. S/RES/1998 (2011), 12 Juli 2011, Butir 3, dapat diakses di: [http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/RES/1998\(2011\)&Lang=E](http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/RES/1998(2011)&Lang=E). Pertama kali Sekjen PBB diminta untuk membuat daftar pihak-pihak dalam konflik bersenjata yang terlibat dalam pelanggaran terhadap anak-anak adalah pada tahun 2001, terkait perekrutan anak-anak. Lihat Resolusi DK PBB 1379, UN Doc. S/RES/1379 (2001), 20 November 2001, paragraf 16, dapat diakses di: [http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/RES/1379\(2001\)&Lang=E](http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/RES/1379(2001)&Lang=E).

meminta Sekretaris Jenderal untuk terus memantau dan melaporkan (walaupun tidak mencantumkan pihak-pihak dalam konflik bersenjata yang bertanggung jawab atas) “penggunaan secara militer sekolah dan rumah sakit yang bertentangan dengan hukum humaniter internasional”.²² Sejak 2011, MRM telah membuat daftar pihak-pihak yang terlibat dalam konflik yang bertanggung jawab atas “serangan terhadap sekolah dan rumah sakit” setiap tahun.

Sejalan dengan proses PBB yang dibahas di atas, masalah pelindungan pendidikan juga mendapat perhatian di kalangan masyarakat sipil, terutama melalui inisiatif yang dipimpin oleh Koalisi Global untuk Melindungi Pendidikan dari Serangan (GCPEA/*Global Coalition to Protect Education from Attack*). GCPEA dibentuk pada tahun 2010 oleh sekelompok organisasi internasional, dan sekarang diatur oleh komite pengarah yang terdiri dari LSM dan badan-badan PBB.²³ Pada tahun 2014, GCPEA merilis Pedoman untuk Melindungi Sekolah dan Universitas dari Penggunaan secara Militer selama Konflik Bersenjata/*Guidelines for Protecting Schools and Universities from Military Use during Armed Conflict* (Pedoman), yang menyediakan berbagai instrumen praktis bagi pihak-pihak yang terlibat konflik bersenjata dengan tujuan mengurangi penggunaan secara militer atas sekolah dan universitas dan meminimalkan dampak negatif penggunaan semacam itu terhadap keselamatan dan pendidikan para siswa.²⁴ Deklarasi Sekolah Aman,²⁵ dokumen yang dengan itu Negara-negara dapat berkomitmen untuk menerapkan Pedoman, terbuka untuk pengesahan pada 29 Mei 2015 dan telah didukung oleh delapan puluh satu Negara pada 4 September 2018.²⁶ Pedoman dan Deklarasi sebagai dokumen pendukung menyerukan kepada pihak-pihak bersenjata untuk menghindari penggunaan gedung-gedung pendidikan untuk menghindari menjadikannya sebagai sasaran serangan yang sah; untuk mengumpulkan data tentang serangan terhadap fasilitas pendidikan, para korban dan penggunaan secara militer sekolah dan universitas; untuk membantu korban; untuk menyelidiki dan menuntut pelanggaran hukum nasional dan internasional; dan untuk mendukung program yang berupaya untuk mencegah atau merespons serangan terhadap pendidikan.²⁷ Pedoman dan Deklarasi menjadi pelengkap isu pelindungan pendidikan yang menjadi bagian dari agenda PBB untuk anak-anak dan konflik bersenjata sejauh keduanya membahas isu penggunaan secara militer fasilitas

²² Resolusi DK PBB 1998, catatan kaki 21 di atas, Butir 4.

²³ GCPEA, “Who We Are”, dapat diakses di: www.protectingeducation.org/who-we-are.

²⁴ GCPEA, “Protecting Schools and Universities from Military Use”, dapat diakses di: www.protectingeducation.org/restricting-military-use-and-occupation.

²⁵ GCPEA, Deklarasi Sekolah Aman (*Safe Schools Declaration*), dapat diakses di: www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/safe_schools_declaration-final.pdf.

²⁶ GCPEA, “Safe Schools Declaration Endorsements”, 4 September 2018, dapat diakses di: <http://www.protectingeducation.org/guidelines/support> (diakses pada September 2018).

²⁷ Lihat GCPEA, *Guidelines for Protecting Schools and Universities from Military Use during Armed Conflict*, dapat diakses di: www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/guidelines_en.pdf; lihat juga GCPEA, catatan kaki 25 di atas.

pendidikan melampaui teks HHI, sambil mengingat bahwa PBB memantau dan melaporkan, antara lain (*inter alia*), kasus penggunaan secara militer sekolah yang bertentangan dengan HHI.²⁸

Inisiatif-inisiatif yang dipimpin PBB yang dibahas di atas, serta proses Sekolah Aman yang mencapai titik kulminasi dalam Pedoman dan Deklarasi, mendekati pendidikan dalam konflik bersenjata dari perspektif yang fokus pada cara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik melaksanakan permusuhan. Upaya-upaya ini difokuskan pada pencegahan dan pengurangan dampak perilaku tertentu dari para pemegang senjata yang menghadirkan risiko bagi fasilitas dan orang-orang terkait pendidikan.

Alhasil, agenda ini memunculkan serangkaian upaya yang berpusat pada otoritas – yaitu, melibatkan aktor Negara dan non-Negara dalam mengupayakan kepatuhan mereka terhadap standar tertentu yang bertujuan untuk memastikan pelindungan pendidikan, melalui mekanisme yang dirancang secara khusus, seperti MRM, dan instrumen-instrumen, seperti Pedoman dan dokumen-dokumen lain yang dihasilkan oleh GCPEA.²⁹

Namun demikian, salah satu seruan dalam Deklarasi Sekolah Aman adalah agar Negara-negara “menyediakan dan memfasilitasi kerja sama dan bantuan internasional untuk program-program yang berupaya untuk mencegah atau merespons serangan terhadap pendidikan”.³⁰ Respons terprogram ini adalah pendekatan yang pada akhirnya ingin dieksplorasi oleh artikel ini.

Namun sebelum membahas respons program untuk memastikan pelindungan pendidikan dari serangan, penting untuk memahami perkembangan respons kemanusiaan di bidang pendidikan secara lebih luas, yang sebagian besar difokuskan pada menjembatani kesenjangan dalam hal akses ke pendidikan.

Menjembatani kesenjangan dalam akses ke pendidikan

²⁸ Resolusi DK PBB 1998, 12 Juli 2011, Butir 4, dapat diakses di: [http://undocs.org/S/RES/1998\(2011\)](http://undocs.org/S/RES/1998(2011)).

²⁹ Lihat, misalnya, GCPEA, *Implementing the Guidelines: A Toolkit to Guide Understanding and Implementation of the Guidelines for Protecting Schools and Universities from Military Use at Armed Conflict*, 2017, dapat diakses di: www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/toolkit.pdf.

³⁰ GCPEA, catatan kaki 25 di atas (penekanan ditambahkan).

Meskipun beberapa organisasi kemanusiaan telah terlibat dalam kegiatan pendidikan selama beberapa dekade,³¹ pada umumnya, lembaga kemanusiaan lambat untuk memasukkan pendidikan dalam respons mereka terhadap situasi darurat.³² Pada tahun 2000, hanya 2% dari total bantuan kemanusiaan yang dialokasikan untuk pendidikan.³³

Baru pada tahun 2000-an EiE muncul sebagai sub-sektor dalam platform kemanusiaan, dengan dibentuknya Jaringan Antar Lembaga untuk Pendidikan dalam Situasi Darurat (INEE/*Inter-Agency Network for Education in Emergencies*) pada tahun 2000³⁴ dan diterbitkannya *Standar Minimum INEE untuk Pendidikan dalam Situasi Darurat, Krisis Kronis dan Rekonstruksi Dini/INEE Minimum Standards for Education in Emergencies, Chronic Crises and Early Reconstruction* (Standar Minimum) pada tahun 2004.³⁵ Penetapan Standar Minimum INEE memberikan sub-sektor EiE kerangka kerja yang jelas untuk aksi, yang menjadi landasan bagi pembentukan Klaster Pendidikan Global PBB pada tahun 2006.³⁶

Perkembangan terakhir lebih lanjut berkontribusi pada perkembangan EiE sebagai sub-sektor. Pada tahun 2012, untuk pertama kalinya, Kemitraan Global untuk Pendidikan, yang pada saat itu merupakan satu-satunya dana global untuk pendidikan dan pelaku pembangunan utama di bidang pendidikan, memutuskan untuk memperbolehkan dana “dicairkan untuk pendidikan anak-anak yang terjebak dalam konteks kemanusiaan”.³⁷ EiE kemudian muncul kembali sebagai topik utama selama proses konsultasi menuju World Humanitarian Summit (WHS) 2016 dan selama WHS itu sendiri.³⁸ WHS juga menjadi ajang untuk meluncurkan Education Cannot Wait, “dana global baru untuk mentransformasi penyampaian pendidikan dalam

³¹ Contoh penting adalah Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA/ *UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East*), yang memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan pendidikan pengungsi Palestina sejak tahun 1950, ketika Badan tersebut mulai beroperasi. Lihat George Dickerson, “Education for the Palestine Refugees: The UNRWA/UNESCO Programme”, *Journal of Palestine Studies*, Vol. 3, No. 3, 1974, halaman 122.

³² USAID, *Education in Crisis Situations: Mapping the Field*, New York, 2005, halaman 9, dapat diakses di: www.beps.net/publications/EdCrisisFinal.pdf.

³³ INEE, *INEE Strategic Plan 2008–2010*, 7 Januari 2008, halaman 4, dapat diakses di: http://s3.amazonaws.com/ineeassets/resources/doc_1_INEE_STRATEGIC_PLAN_2008-2010.pdf.

³⁴ USAID, catatan kaki 32 di atas, halaman 10

³⁵ INEE, “History and Development”, dapat diakses di: www.ineesite.org/en/minimum-standards/history. Lihat juga INEE, *Education Cannot Wait: A Fund for Education in Emergencies*, 2004, dapat diakses di: www.unicef.org/violencestudy/pdf/min_standards_education_emergencies.pdf; serta edisi terbarunya, *INEE Minimum Standards for Education: Preparedness, Response, Recovery*, 2010 (2010 Minimum Standards), dapat diakses di: http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1012/INEE_GuideBook_EN_2012%20LoRes.pdf.

³⁶ Pendidikan pada awalnya tidak dianggap sebagai sektor penting untuk dimasukkan dalam Sistem Klaster ketika dibuat pada tahun 2005. Untuk lebih jelasnya tentang proses panjang yang menyebabkan pembentukan Klaster Pendidikan dan keterlibatan INEE dan Save the Children dalam upaya tersebut, lihat Allison Anderson dan Marian Hodgkin, *The Creation and Development of the Global IASC Education Cluster*, UNESCO and Education For All Global Monitoring Report, 2010, halaman 1-9, dapat diakses di: http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/Creation_and_Development_of_Global_Education_Cluster.pdf.

³⁷ Brookings Institution, *New Momentum for Global Education and the Post-2015 Development Agenda*, 30 November 2012, dapat diakses di: www.brookings.edu/blogs/up-front/posts/2012/11/30-education-winthrop.

³⁸ INEE, “World Humanitarian Summit 2016”, dapat diakses di: www.ineesite.org/en/whs-2016.

keadaan darurat” dengan tujuan ambisius untuk menyediakan pendidikan yang aman, gratis, dan berkualitas bagi semua anak yang terdampak keadaan darurat pada tahun 2030.³⁹

Namun, seperti yang sudah dikemukakan, fokus utama dari EIE adalah menjamin akses ke layanan pendidikan bagi penduduk yang terdampak krisis kemanusiaan, termasuk konflik. Seperti yang dikatakan para ahli EiE, istilah “pendidikan dalam situasi darurat” – atau “pendidikan darurat”, sebagaimana kadang-kadang disebut – umumnya digunakan di level antar-lembaga untuk merujuk pada pendidikan dalam situasi di mana anak-anak tidak memiliki akses ke sistem pendidikan, di tingkat nasional atau masyarakat, karena krisis akibat ulah manusia atau bencana alam.⁴⁰ Berbeda dengan pendekatan pelindungan yang berupaya mempertahankan kelangsungan sistem pendidikan yang ada selama konflik, sektor EiE tampaknya terutama fokus pada membangun atau membangun kembali layanan pendidikan bagi penduduk yang mengungsi atau tidak dapat mengakses pendidikan karena konflik bersenjata. Secara khusus, prioritas perhatian tampaknya diberikan pada kebutuhan pendidikan dari populasi pengungsi⁴¹ dan pada strategi inklusi yang bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh kelompok anak-anak tertentu yang mungkin ditolak aksesnya ke pendidikan karena status, etnis atau bahasa mereka. Kelompok-kelompok semacam itu, selain anak-anak pengungsi, juga mencakup minoritas etnis atau agama, anak-anak penyandang disabilitas dan, secara khusus, anak perempuan.⁴²

³⁹ Lihat situs resmi Education Cannot Wait, dapat diakses di: www.educationcannotwait.org/; lihat juga INEE, “Education Cannot Wait: A Fund for Education in Emergencies”, dapat diakses di: www.ineesite.org/en/education-cannot-wait.

⁴⁰ Lihat, misalnya, Margaret Sinclair, “Education in Emergencies”, dalam Jeff Crisp, Christopher Talbot dan Daiana B. Cipollone (editor), *Learning for a Future: Refugee Education in Developing Countries*, UNHCR, Jenewa, 2001, halaman 4, dapat diakses di: www.unhcr.org/4a1d5ba36.pdf ; Susan Nicolai dan Carl Triplehorn, *The Role of Education in Protecting Children in Conflict*, Humanitarian Practice Network Paper No. 42, Maret 2003, halaman 2, dapat diakses di: www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/520.pdf.

⁴¹ Salah satu dari empat jenis krisis yang memenuhi syarat untuk didanai melalui Education Cannot Wait adalah “krisis dengan pengungsian skala besar dengan populasi tuan rumah yang terdampak”. Lihat Education Cannot Wait, “The Situation”, dapat diakses di: www.educationcannotwait.org/the-situation/. Selama WHS, akan halnya pendidikan dalam keadaan darurat, penekanan khusus diberikan pada konteks pengungsian, “dengan beberapa komitmen signifikan yang dibuat untuk menjamin penyediaan pendidikan yang berkualitas bagi para pengungsi dan untuk meningkatkan dukungan pendidikan bagi negara-negara penerima pengungsi”. Lihat WHS, *Commitments to Action*, 8 September 2016, halaman 5, dapat diakses di: www.agendaforhumanity.org/sites/default/files/resources/2017/Jul/WHS_Commitment_to_Action_8September2016.pdf. Selanjutnya, WHS menjadi ajang bagi tiga puluh delapan aktor, termasuk Negara, LSM dan organisasi internasional, untuk membuat tujuh puluh tujuh komitmen terkait pendidikan. Sepertiga dari komitmen tersebut (yaitu, dua puluh enam, oleh dua puluh satu aktor) menyebutkan pengungsian secara langsung, termasuk rujukan ke imigran, pengungsi lintas batas, pengungsi dalam negeri, masyarakat dan negara tuan rumah, dan kamp-kamp pengungsi. Ini didasarkan pada pemetaan singkat, yang dilakukan oleh penulis, tentang semua komitmen yang terdaftar di bawah kategori “Education” di website Agenda for Humanity. Lihat Agenda for Humanity, “Individual Commitments”, dapat diakses di: www.agendaforhumanity.org/explorecommitments/indv-commitments/.

⁴² Susan Nicolai, *Education in Emergencies: A Tool Kit for Starting and Managing Education in Emergencies*, Save the Children, London, 2003, halaman 29–30, dapat diakses di: http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1045/Active_Learning_Diagram.pdf. Menurut pemetaan yang dilakukan oleh penulis, disebutkan dalam catatan kaki 41 di atas, sekitar 10% dari komitmen terkait pendidikan yang dibuat selama WHS berkaitan dengan pendidikan inklusif – terutama, pendidikan anak perempuan. “Pendidikan anak perempuan dan isu gender”, serta “inklusi dan kohesi sosial”, juga merupakan

Standar Minimum INEE mencakup aksi-aksi penting yang difokuskan pada menjembatani kesenjangan dalam akses ke pendidikan, seperti memastikan bahwa “tidak ada individu atau kelompok sosial yang ditolak aksesnya ke pendidikan dan kesempatan belajar karena diskriminasi”, menghilangkan “hambatan-hambatan untuk pendaftaran, seperti kurangnya dokumen atau persyaratan lain”, dan memastikan bahwa “sumber daya yang memadai tersedia”.⁴³ Dalam praktiknya, organisasi seperti Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dan Save the Children melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan ini. Kegiatan tersebut meliputi penyediaan fasilitas sekolah sementara (termasuk tenda sekolah); pembangunan sekolah; pelatihan dan rekrutmen guru; penyediaan bahan ajar; mendukung pengembangan kurikulum; pelatihan bahasa, agar anak dan guru mampu beradaptasi dengan lingkungan di mana bahasa yang dipakai bukan bahasa ibu mereka; dan menopang biaya pendidikan.⁴⁴ Seperti yang akan terlihat di bawah ini, ICRC sendiri juga melaksanakan beberapa kegiatan tersebut – terutama penyediaan bahan ajar dan menopang biaya pendidikan.

Respons program untuk memastikan pelindungan pendidikan

Selain fokusnya untuk merespons situasi kemanusiaan di mana pendidikan untuk anak-anak minim, dikatakan bahwa sub-sektor EiE juga menganggap pelindungan pendidikan dari serangan sebagai permasalahan kemanusiaan, dan bahwa kegiatan EiE berkontribusi pada pelindungan pendidikan dalam situasi konflik bersenjata. Dengan cara ini, keahlian yang telah dikembangkan oleh sub-sektor ini menjadi fondasi bagi respons program untuk memastikan pelindungan pendidikan dari serangan.

Pertama-tama, Standar Minimum INEE mengamati bahwa “fasilitas-fasilitas pendidikan dapat menjadi sasaran selama konflik atau siswa dan tenaga kependidikan dapat diserang dalam perjalanan ke dan dari sekolah”,⁴⁵ dan serangan terhadap lembaga pendidikan, para siswa dan staf sekolah disebutkan di seluruh dokumen ini. Selain itu, monitoring adalah salah satu standarnya, dan ini mencakup monitoring “pelanggaran terhadap keselamatan dan kesejahteraan peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lainnya” serta keadaan

kegiatan utama dari Strategi Pendidikan UNHCR; lihat UNHCR, 2012–2016 *Education Strategy*, Jenewa, 2012, halaman 15–16, dapat diakses di: www.unhcr.org/5149ba349.

⁴³ Standar Minimum 2010, catatan kaki 35 di atas, halaman 55.

⁴⁴ Save the Children, *Delivering Education for Children in Emergencies: A Key Building Block for the Future*, London, 2008, halaman 8–9, dapat diakses di: <https://resourcecentre.savethechildren.net/node/2710/pdf/2710.pdf>; UNHCR, catatan kaki 42 di atas, halaman 11–12, 15–16, 19–20.

⁴⁵ Standar Minimum 2010, catatan kaki 35 di atas, halaman 3.

infrastruktur pendidikan.⁴⁶ Ini juga menekankan pentingnya lingkungan belajar “bebas dari pendudukan dan serangan militer”.⁴⁷

Selanjutnya, selama WHS, perhatian diberikan pada isu pelindungan pendidikan, melalui penyebutan pendidikan yang aman, lingkungan belajar yang aman dan keselamatan siswa dan guru dalam komitmen-komitmen terkait pendidikan.⁴⁸

Dalam beberapa kasus, penyebutan keselamatan ini merujuk pada ancaman internal terhadap lingkungan sekolah, dan seringkali disertai dengan logika yang mendahului pengarusutamaan pelindungan dalam kegiatan EiE. Secara praktis, Strategi Pendidikan UNCHR mengamati bahwa memastikan agar sekolah adalah lingkungan belajar yang aman harus menjadi perhatian utama bagi organisasi yang memberikan pendidikan secara langsung dan terlibat dalam pembangunan sekolah, dengan perhatian khusus diberikan (tetapi tidak terbatas) pada pencegahan kekerasan di dalam sekolah, “termasuk isu pedagogi, hukuman fisik, kekerasan teman sebaya, dan pelecehan atau eksplorasi seksual”.⁴⁹ Beberapa contoh organisasi yang menempuh pendekatan ini adalah UNHCR dan International Rescue Committee (IRC),⁵⁰ Plan International,⁵¹ dan UNICEF.⁵²

Meskipun demikian, selain untuk melindungi individu dari ancaman di dalam sekolah, program EiE juga dapat dirancang untuk mengurangi paparan terhadap ancaman eksternal – untuk memastikan keselamatan siswa dan staf sekolah serta untuk menjaga integritas gedung sekolah. Hal ini dapat dicapai melalui program berbasis komunitas di mana komunitas sekolah, termasuk siswa, orang tua dan staf sekolah, bersiap menghadapi keadaan darurat di masa mendatang, termasuk dengan memperkuat ketahanan dan infrastruktur sekolah mereka. Inisiatif semacam itu sesuai dengan respons program untuk memastikan pelindungan pendidikan.

Sebagian komitmen yang dibuat selama WHS mencerminkan fokus ini. Sebagai contoh, baik Save the Children maupun World Vision mendukung Prinsip-prinsip Penting Konstruksi Sekolah Aman Berbasis Masyarakat dan berkomitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip ini untuk

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 46.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 61.

⁴⁸ Delapan aktor menyebutkan istilah-istilah ini dalam komitmen mereka terhadap pendidikan, menurut pemetaan yang dilakukan oleh penulis, yang disebutkan dalam catatan kaki 41 di atas.

⁴⁹ UNHCR, catatan kaki 42 di atas, halaman 15.

⁵⁰ UNHCR dan IRC, “Creating Safe Learning Environments: E-Course”, dapat diakses di: http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/SLE_e_course_flyer.pdf.

⁵¹ Plan International, “Preventing Violence against Girls at School”, dapat diakses di: <https://plan-international.org/because-i-am-a-girl/violence-at-school>.

⁵² UNICEF Kamboja, “Safe Learning Spaces”, dapat diakses di: www.unicef.org/cambodia/12962_19147.html.

“setiap kelas yang [mereka] rombak atau bangun kembali secara substansial”.⁵³ Prinsip-Prinsip Penting menetapkan standar minimum keselamatan hidup untuk setiap gedung sekolah baru yang akan dibangun, serta untuk gedung sekolah yang ada yang akan “diperkuat, direnovasi, dirombak, diperbaharui atau dimodernisasi”.⁵⁴

Yang lebih jelas terkait dengan isu pelindungan pendidikan adalah komitmen Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), dalam konteks WHS, untuk mengakui “pentingnya sekolah bekerja bahu membahu dengan masyarakat demi keselamatan, kesejahteraan dan pembelajaran para siswa”,⁵⁵ untuk memastikan keselamatan guru dan staf lainnya dan untuk mengembangkan kapasitas mereka agar lebih baik menghadapi keadaan darurat.⁵⁶ Faktanya, UNRWA telah menerapkan langkah-langkah keselamatan dan keamanan di sekolah-sekolahnya di Suriah dan Gaza, seperti penyediaan pelatihan pendidikan risiko dan materi pelatihan keamanan, yang semuanya ditujukan untuk mengurangi paparan risiko staf sekolah dan siswa.⁵⁷

Standar Minimum INEE juga menetapkan partisipasi masyarakat sebagai standar dasar, dan, dengan itu, mereka merekomendasikan “pengembangan, adaptasi dan penyampaian pendidikan untuk pengurangan risiko bencana dan mitigasi konflik”, memanfaatkan dan memperkuat “strategi dan kapasitas lokal yang positif”.⁵⁸ Sebagaimana diobservasi oleh Standar Minimum, “dengan berpartisipasi dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan pengurangan risiko, anak-anak dan kaum muda bisa kurang merasa tidak berdaya dan dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan mereka sendiri”.⁵⁹

Tidak bisa dipungkiri, kegiatan yang bertujuan untuk mencegah bahaya dan berkontribusi untuk memperkuat ketahanan komunitas sekolah, seperti pendidikan risiko ranjau di sekolah,

⁵³ Agenda for Humanity, “Commitment Description (252018)”, dapat diakses di: www.agendaforhumanity.org/commitment/2675; Agenda for Humanity, “Commitment Description (294016)”, dapat diakses di: www.agendaforhumanity.org/commitment/3491.

⁵⁴ Lihat Global Alliance for Disaster Risk Reduction and Resilience in the Education Sector, *Towards Safer School Construction: A Community-Based Approach*, 2015, halaman 11–12, dapat diakses di: www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/45179_towardssaferschoolconstruction2015_0.pdf.

⁵⁵ Agenda for Humanity, “Commitment Description (288019)”, dapat diakses di: www.agendaforhumanity.org/commitment/3338.

⁵⁶ Agenda for Humanity, “Commitment Description (288026)”, dapat diakses di: www.agendaforhumanity.org/commitment/3345.

⁵⁷ UNRWA, *Schools on the Front Line: The Impact of Armed Conflict and Violence on UNRWA Schools and Education Services*, 2016, halaman 12, dapat diakses di: www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/schools_on_the_front_line.pdf. UNRWA juga memberikan pelatihan keamanan kepada staf dari Yordania dan Lebanon; lihat UNRWA, “Fostering the Safety and Security of School Communities, UNRWA Runs a Integrated Training Program for Education Staff and Safety Personnel”, 16 Desember 2015, dapat diakses di: www.unrwa.org/newsroom/features/fostering-safety-and-security-school-communities-unrwa-runs-integratedtraining.

⁵⁸ Standar Minimum 2010, catatan kaki 35 di atas, halaman 30.

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 62.

telah dilaksanakan oleh organisasi seperti Save the Children⁶⁰ dan UNICEF.⁶¹ Selain itu, dimasukkannya praktik pengurangan risiko bencana (DRR/*Disaster Risk Reduction*) dalam kurikulum merupakan bagian dari strategi pendidikan global Save the Children dari 2012 hingga 2015,⁶² dan Plan International memiliki program untuk meningkatkan keselamatan di sekolah-sekolah di zona risiko gempa.⁶³

Praktik DRR juga dapat menjadi sumber informasi perilaku aman untuk diadopsi oleh komunitas sekolah yang terpapar konflik bersenjata. Bahkan, promosi perilaku aman dan prosedur evakuasi sebagai kesiapsiagaan untuk situasi kekerasan bersenjata, yang merupakan bagian dari program ICRC di sekolah-sekolah di Kaukasus selatan, disiapkan dengan dukungan dan keahlian dari unit DRR Palang Merah Armenia dan Bulan Sabit Merah Azerbaijan.

Respons berbasis komunitas dan bersifat penguatan ketahanan atas kebutuhan terkait pendidikan di tengah konflik ini sebagian merespons permasalahan terkait pelindungan pendidikan. Dengan berfokus pada masyarakat, respons program ini dapat melengkapi interaksi dengan pihak berwenang dan pemegang senjata dalam memastikan pelindungan sekolah dan orang-orang yang dilindungi yang relevan.

GCPEA, meskipun berfokus pada upaya advokasi *vis-à-vis* Negara untuk memastikan pelindungan pendidikan, juga telah memperhatikan pentingnya respons program terhadap isu tersebut. Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu seruan Pedoman GCPEA adalah agar Negara-negara “mendukung program yang bekerja untuk mencegah atau merespons serangan terhadap pendidikan”, dan Koalisi telah membuat laporan komprehensif tentang kegiatan yang dapat dilaksanakan di tingkat masyarakat untuk “melindungi pendidikan dari serangan dan penggunaan secara militer”.⁶⁴ Ini termasuk contoh-contoh dari konteks seperti Afghanistan, Republik Afrika Tengah, Pantai Gading, Mali, Pakistan dan Thailand, di mana masyarakat telah mengadopsi langkah-langkah untuk memastikan pelindungan fisik, seperti

⁶⁰ Save the Children Sudan, “Child Protection”, dapat diakses di: <https://sudan.savethechildren.net/what-we-do/child-protection>.

⁶¹ UNICEF Bosnia dan Herzegovina, “Mine Risk Education in Schools”, dapat diakses di: www.unicef.org/bih/mine_action_3314.html.

⁶² Save the Children, *Moving Ahead on Education: A Focused Strategy for Achieving our Education Goals 2012–2015*, 2012, halaman 12, dapat diakses di: <https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/6526.pdf>.

⁶³ Lihat Plan International, *Policy Brief: Advancing Comprehensive School Safety for Asia and the Pacific*, November 2016, dapat diakses di: <https://plan-international.org/file/14593/download?token=wOXTzRLd>.

⁶⁴ Lihat GCPEA, *The Role of Communities in Protecting Education from Attack: Lessons Learned*, New York, 2014, dapat diakses di: http://protectingeducation.org/sites/default/files/documents/the_role_of_communities_in_protecting_education_from_attack.pdf; GCPEA, *What Schools Can Do to Protect Education from Attack and Military Use*, New York, 2016, dapat diakses di: www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/what_schools.pdf.

penguatan infrastruktur sekolah; sistem peringatan dini, misalnya melalui layanan pesan teks; dukungan psikososial; dan bahkan negosiasi langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, untuk melindungi sekolah dari serangan dan penggunaan secara militer.

Pendekatan berbasis masyarakat untuk pelindungan pendidikan di masa konflik inilah yang sekarang ingin dieksplorasi oleh artikel ini, terutama dengan berbagi pengalaman ICRC dengan program serupa dan keahlian yang dikembangkan di sana. Namun, sebelum mencermati respons berbasis komunitas ICRC di sekolah, kami akan memberikan gambaran singkat tentang keterlibatan organisasi ini di bidang pendidikan secara lebih luas.

Respons ICRC

Akses ke pendidikan telah lama menjadi bagian dari strategi ICRC terkait anak-anak, dan selama bertahun-tahun, kantor-kantor delegasi lapangan ICRC telah mengembangkan dan menerapkan sejumlah inisiatif dalam konteks dan format berbeda, yang ditujukan untuk menjawab tantangan dalam mengakses pendidikan dalam situasi konflik. Pada tahun 2016, ICRC memulai proses konsolidasi pendekatannya terhadap pendidikan dalam situasi kemanusiaan; upaya ini melibatkan konsultasi dengan pakar eksternal dan staf internal, baik di lapangan maupun di kantor pusat.

Baik dalam contoh masa lalu maupun dalam proses saat ini dalam mengkonsolidasikan pendekatan ICRC terhadap pendidikan sebagai kebutuhan kemanusiaan, ada konsensus yang muncul di dalam organisasi ini bahwa peran ICRC adalah untuk memfasilitasi akses ke pendidikan, alih-alih memberikan pendidikan secara langsung kepada penduduk yang terdampak. Konsensus ini sebagian besar berasal dari pemahaman tentang nilai tambah dan kekuatan yang dibawa ICRC untuk mendukung inisiatif kemanusiaan dalam situasi konflik.

Pada bagian ini, tiga dimensi respons ICRC dieksplorasi. Pertama, pendekatan ICRC yang berpusat pada otoritas – yaitu, dialog yang dilakukan dengan Negara dan aktor-aktor non-negara tentang isu akses ke pendidikan – akan dibahas. Pendekatan ini bermanfaat bagi pendidikan baik dalam hal melindungi pendidikan dari serangan, dan dari segi perspektif dominan EIE yang berfokus pada membangun atau membangun kembali akses ke layanan pendidikan. Kedua, kegiatan-kegiatan ICRC yang juga bertujuan untuk memberi ruang bagi akses kepada pendidikan dengan memberikan bantuan langsung kepada penduduk yang terdampak juga akan ditelaah. Terakhir, artikel ini membahas bagaimana ICRC berinteraksi

dengan masyarakat dengan tujuan melindungi pendidikan, sambil melihat contoh spesifik program Sekolah yang Lebih Aman di Ukraina timur.

Dialog pelindungan dengan otoritas dan pemegang senjata

Aktivitas utama dari pekerjaan pelindungan ICRC adalah terkait interaksi/pelibatan dalam suatu dialog konfidensial dengan pemegang senjata dan otoritas untuk mencegah dan/atau mengakhiri pelanggaran HHI. Pekerjaan ini memiliki kaitan dengan pendidikan dalam situasi kemanusiaan dalam dua hal.

Pertama, baik di masa damai atau pada saat konflik, Negara memiliki tanggung jawab utama untuk menyediakan pendidikan bagi warganya. Kelompok bersenjata non-negara juga terikat oleh aturan tertentu mengenai pendidikan berdasarkan HHI.⁶⁵ Dari perspektif ini, ICRC mengingatkan pihak berwenang akan kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional untuk memastikan akses ke pendidikan.⁶⁶ Di bidang ini, ICRC dapat meminta agar pihak berwenang menerapkan atau meningkatkan layanan pendidikan, terutama untuk kelompok

⁶⁵ Protokol Tambahan II pada Konvensi-konvensi Jenewa mewajibkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata non-internasional – yang mencakup kelompok-kelompok bersenjata non-Negara – untuk memastikan agar anak-anak “diberikan perawatan dan bantuan yang mereka butuhkan”, dan secara khusus agar “mereka harus mendapatkan pendidikan, termasuk pendidikan agama dan moral, sesuai dengan keinginan orang tua mereka, atau jika tidak ada orang tua, sesuai dengan keinginan dari mereka yang bertanggung jawab atas perawatan mereka”. Lihat Protokol Tambahan (II) pada Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan terkait dengan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional, 1125 UNTS 609, 8 Juni 1977 (berlaku 7 Desember 1978) (PT II), Pasal 4.3(a). Selanjutnya, penelitian menunjukkan bahwa aktor-aktor bersenjata non-Negara dalam sejarah belakangan ini telah memberikan pendidikan atau bertindak sebagai regulator dan fasilitator dalam penyediaan layanan pendidikan; lihat Protect Education in Insecurity and Attack, *Education and Armed Non-State Actors: Towards a Comprehensive Agenda*, 2015, dapat diakses di: www.genevacall.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2015/12/Geneva_Call_Paper1.pdf. Yang lebih baru, dalam sebuah studi oleh Geneva Call, “semua ANSA [aktor bersenjata non-Negara] yang diwawancara menegaskan bahwa mereka akan mendukung dengan cara tertentu sekolah-sekolah yang terletak di wilayah tempat mereka beroperasi”. Geneva Call, *In Their Words: Armed Non-State Actors Share Their Policies and Practice with Regards to Education in Armed Conflict*, November 2017, halaman 8, dapat diakses di: <https://genevacall.org/new-study-education-conflict-zones-perspectives-armed-non-stateactors/>.

⁶⁶ HHI Kebiasaan yang berkaitan dengan anak-anak (suatu norma yang berlaku baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional) menyatakan bahwa “anak-anak yang terdampak konflik bersenjata berhak atas penghormatan dan perlindungan khusus”, dan praktik menunjukkan bahwa ini termasuk akses ke pendidikan. Lihat Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck (editor), *Customary International Humanitarian Law*, Vol. 1: *Rules*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005 (Studi Hukum Kebiasaan ICRC), Aturan 135. Selain HHI Kebiasaan, ketentuan khusus untuk konflik bersenjata non-internasional (lihat catatan kaki 65 di atas), dan aturan umum HHI yang melindungi siswa, tenaga kependidikan, dan fasilitas pendidikan dalam pelaksanaan permusuhan, Konvensi-konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I secara khusus membahas pendidikan sehubungan dengan situasi berikut dalam konflik bersenjata internasional: semua anak di bawah 15 tahun menjadi yatim piatu atau terpisah akibat perang (lihat Konvensi Jenewa (IV) tentang Perlindungan Warga Sipil pada Saat Perang tanggal 12 Agustus 1949, 75 UNTS 287 (berlaku 21 Oktober 1950) (KJ IV), Pasal 13, 24); interniran sipil, terutama anak-anak dan kaum muda (KJ IV, Pasal 94, 108, 142); pendudukan (KJ IV, Pasal 50); keadaan yang melibatkan evakuasi anak-anak (Protokol Tambahan (I) pada Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan berkaitan dengan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional, 1125 UNTS 3, 8 Juni 1977 (berlaku 7 Desember 1978) (PT I), Pasal 78); dan tawanan perang (Konvensi Jenewa (III) tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang 12 Agustus 1949, 75 UNTS 135 (berlaku 21 Oktober 1950), Pasal 38, 72, 125). Terakhir, hak atas pendidikan juga diabadikan dalam beberapa instrumen hukum hak asasi manusia internasional, yang juga berlaku pada saat konflik bersenjata.

anak tertentu yang mungkin menghadapi tantangan tertentu dalam mengakses pendidikan, seperti anak terlantar dan anak-anak yang berada dalam tahanan.

Dalam hal ini, dialog ICRC dengan pihak berwenang bertujuan untuk memastikan pendidikan bagi penduduk yang tidak mendapatkan akses ke layanan semacam itu. Oleh karena itu, dimensi kegiatan ICRC yang berpusat pada otoritas ini dibangun di atas misi organisasi dan kewajiban Negara dan aktor non-negara berdasarkan HHI, dan seperti yang terlihat di atas, ini lebih terkait dengan pendekatan yang berfokus pada menjembatani kesenjangan dalam hal akses pendidikan dalam situasi kemanusiaan.

Dimensi lain dari interaksi ICRC dengan otoritas dan pemegang senjata menyangkut isu pelindungan pendidikan, terkait dengan perilaku permusuhan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata dan terkait erat dengan HHI, seperti yang terlihat di atas.

Selama konflik, baik Negara maupun aktor non-negara memiliki tanggung jawab untuk meminimalisir dampak permusuhan terhadap warga sipil dan objek sipil.⁶⁷ Dalam hal ini, ICRC mendokumentasikan insiden-insiden yang mempengaruhi fasilitas pendidikan dan orang-orang yang dilindungi yang relevan, dan data yang dikumpulkan menjadi sumber informasi bagi intervensi ICRC dengan pemegang senjata. Mengingatkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik akan kewajiban mereka berdasarkan HHI adalah instrumen yang digunakan ICRC untuk memastikan pelindungan siswa dan staf sekolah, sebagai warga sipil, serta sekolah dan fasilitas pendidikan lainnya, sebagai objek sipil – sejauh mereka mempertahankan sifat sipil mereka. Jika memungkinkan, ICRC juga mendorong para pihak untuk mengambil tindakan di luar teks HHI, seperti mencegah penggunaan sekolah untuk tujuan yang dapat menyebabkan mereka kehilangan pelindungan berdasarkan HHI.

Dalam praktiknya, ICRC telah berinteraksi dengan Negara dan aktor bersenjata non-Negara dalam isu-isu seperti serangan terhadap sekolah, penggunaan sekolah secara militer, dan ancaman terhadap guru. ICRC juga mengangkat faktor-faktor lain yang membatasi akses kepada pendidikan selama konflik, termasuk lokasi pos pemeriksaan dan fasilitas militer di sekitar sekolah, ancaman keamanan (seperti kontaminasi senjata) di jalur menuju sekolah, perekrutan anak dan kekerasan seksual, serta pembatasan pergerakan. Upaya-upaya ini juga

⁶⁷ Tanggung jawab ini diabadikan dalam aturan HHI Kebiasaan mengenai pembedaan antara warga sipil dan kombatant, pembedaan antara objek sipil dan sasaran militer, serangan tanpa pandang bulu, proporsionalitas dalam serangan, kehati-hatian dalam serangan, dan kehati-hatian terhadap dampak serangan (lihat Studi Hukum Kebiasaan ICRC, catatan kaki 66 di atas, Bab I). Hal ini juga tercermin dalam PT I, khususnya Pasal 48 (tentang asas pembedaan), Pasal 51 (tentang perlindungan penduduk sipil) dan Pasal 52 (tentang perlindungan objek sipil), serta dalam PT II khususnya Pasal 13 (tentang perlindungan penduduk sipil).

berpusat pada otoritas; namun, perbedaan penting antara hal ini dengan kerja advokasi organisasi seperti GCPEA dan MRM, adalah bahwa dialog ICRC dengan pihak berwenang dan pembawa senjata bersifat konfidensial.

Bantuan langsung kepada anak usia sekolah atau pengasuh mereka

Cara lain di mana ICRC berkontribusi terhadap akses ke pendidikan dalam konteks kemanusiaan adalah melalui pemberian bantuan langsung atau layanan khusus kepada anak-anak dan keluarga mereka.

Dalam banyak konflik, anak-anak tidak memiliki akses ke pendidikan karena alasan ekonomi, termasuk karena keluarga/pengasuh mereka tidak mampu membayar uang sekolah, seragam dan/atau biaya lain terkait pendidikan. Dalam kasus seperti itu, ICRC dapat menyediakan perlengkapan sekolah sebagai bagian dari distribusi bantuan, atau bahkan menutupi biaya sekolah. Misalnya, pada tahun 2015 di Mesir, ICRC memberikan dukungan ekonomi untuk menutupi biaya sekolah dan transportasi bagi sekitar 1.000 anak Suriah. Di Rusia selatan, ICRC menyediakan perlengkapan sekolah untuk lebih dari 2.000 anak Ukraina yang mengungsi, dan di Suriah ICRC mendistribusikan 100.389 perlengkapan sekolah pada tahun 2014 saja. Pemberian bahan-bahan pendidikan juga dapat mendukung pendidikan anak-anak dalam tahanan, dan ICRC memberikan bantuan semacam ini dalam bentuk distribusi sekali, misalnya di Israel, Afghanistan dan Ethiopia.

Dalam beberapa konteks, khususnya mereka yang terdampak pengungsian, ICRC dapat memfasilitasi transfer dokumen yang diperlukan untuk mendaftarkan anak-anak ke sekolah di tempat tinggal mereka yang baru. Organisasi ini juga dapat mendukung transportasi siswa ke dan dari lembaga pendidikan – misalnya, pada tahun 2016 di Sudan Selatan, ICRC mengangkut dua puluh delapan siswa pengungsi internal dari lokasi pengungsian mereka ke Universitas Juba, sehingga mereka dapat mengikuti ujian meskipun pertempuran sedang berlangsung.

Respons terhadap kebutuhan pendidikan dalam situasi kemanusiaan ini mencerminkan pendekatan dominan EiE yang berfokus pada mengatasi kesenjangan dalam hal akses ke pendidikan. Ini juga sesuai dengan kegiatan EiE standar untuk populasi yang tidak memiliki akses ke pendidikan – terutama, penyediaan bahan ajar dan mendukung biaya pendidikan.⁶⁸

⁶⁸ Lihat catatan kaki 44 di atas.

Kegiatan berbasis masyarakat

Pilar lain dari pekerjaan ICRC untuk memastikan pelindungan warga sipil terdiri dari kegiatan-kegiatan berbasis masyarakat, yang dibangun di atas dialog dengan masyarakat itu sendiri dan berfokus pada penguatan ketahanan penduduk yang terdampak dan kapasitas mereka untuk mengurangi paparan terhadap ancaman dan strategi penanggulangan bahaya. Kegiatan-kegiatan semacam itu melengkapi pendekatan yang berpusat pada otoritas sebagaimana dibahas di atas dan mungkin memiliki dampak lebih langsung pada pelindungan sekolah dan masyarakat yang berisiko.⁶⁹

Kegiatan-kegiatan ICRC berbasis masyarakat dilakukan secara multidisiplin, membangun keahlian khusus dari unit-unit berbeda dalam Divisi Bantuan dan Pelindungan organisasi ini, termasuk Kesehatan, Air dan Habitat, Ketahanan Ekonomi, Penahanan, Pelindungan Penduduk Sipil, dan Kontaminasi Senjata. Bantuan materi yang diberikan kepada penduduk yang terdampak memainkan peran penting dalam program ini, karena mereka membantu mewujudkan hasil pelindungan dengan mengurangi paparan risiko. Seperti inilah program-program berbasis masyarakat yang ditelaah pada bagian ini.

Kegiatan berbasis masyarakat dapat membantu memastikan pelindungan pendidikan dengan memperkuat ketahanan komunitas sekolah, termasuk siswa, guru, staf sekolah dan orang tua, serta bangunan sekolah itu sendiri. Artikel ini akan membahas secara rinci program ICRC di sekolah-sekolah di Ukraina, sebagai contoh pendekatan berbasis masyarakat organisasi ini untuk melindungi pendidikan.

Program berbasis masyarakat serupa yang menyasar sekolah dan komunitas sekolah yang secara khusus terpapar risiko telah dilaksanakan di tempat lain, termasuk Armenia, Lebanon dan berbagai kota yang terdampak kekerasan perkotaan di Amerika Latin, seperti Rio de Janeiro (Brasil), Guatemala City (Guatemala) dan Ciudad Juarez (Meksiko). Namun, untuk tujuan artikel ini, kami akan fokus pada Ukraina karena ini adalah konteks di mana ICRC telah menerapkan salah satu programnya yang paling holistik di sekolah-sekolah yang terdampak konflik.

⁶⁹ Lihat Angela Cotroneo dan Marta Pawlak, "Community-Based Protection: The ICRC Approach", *Forced Migration Review*, No. 53, Oktober 2016, halaman 37, dapat diakses di www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/community-protection/cotroneo-pawlak.pdf.

Program Sekolah Aman ICRC di Ukraina bagian timur⁷⁰

Sejak April 2014, ketika konflik bersenjata meletus, orang-orang di Ukraina bagian timur, terutama mereka yang tinggal di dekat garis kontak (garis yang memisahkan wilayah yang dikendalikan pemerintah dengan yang tidak dikendalikan pemerintah) di kedua sisi, menghadapi kesulitan yang semakin berat di tengah memburuknya situasi konflik.

Kesinambungan layanan pendidikan juga mendapat tantangan serius, terutama di sepanjang garis kontak. Menurut UNICEF, daerah dalam jarak 5 kilometer dari garis kontak di sisi yang dikendalikan pemerintah merupakan rumah bagi sekitar 54.000 anak-anak dan 110 fasilitas pendidikan.⁷¹ Kajian Kebutuhan Kemanusiaan 2018 untuk Ukraina (*2018 Humanitarian Needs Overview for Ukraine*) oleh Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melaporkan 700.000 siswa dan guru membutuhkan dukungan pendidikan, termasuk sekitar 220.000 orang yang tengah menghadapi “kebutuhan mendesak sekolah yang aman dan terlindungi untuk belajar dan memulihkan diri”.⁷²

Keberadaan ICRC relatif kecil di Ukraina dari 1995 hingga 2011, ketika memutuskan untuk menutup kantornya di negara itu. Pada bulan Maret 2014, ketika krisis meletus, ICRC membuka kantor delegasi baru di Kiev, kemudian secara bertahap memperluas operasinya untuk merespons kebutuhan kemanusiaan yang terus meningkat. Kantor ICRC dibuka di kedua sisi garis kontak, di Donetsk, Luhansk, Sieverodonetsk, Sloviansk, Mariupol dan Odesa. Staf delegasi secara bertahap bertambah menjadi lebih dari 500 orang hingga saat ini (*ketika artikel ini disusun pada 2018*).

Sebagai bagian dari perluasan kehadiran dan kegiatannya di negara tersebut, pada tahun 2015 ICRC mulai melaksanakan program yang bertujuan untuk membuat sekolah dan komunitas sekolah lebih aman dan lebih tahan terhadap dampak buruk perrusuhan.

Pada tahap awal, hingga akhir 2016, program ini menyangkai sekitar lima puluh sekolah di tiga puluh satu kota dan desa di wilayah Donetsk dan Luhansk. Seiring perkembangannya,

⁷⁰ Kecuali dinyatakan lain, informasi pada bagian ini yang berkaitan dengan program ICRC di Ukraina berasal dari laporan internal yang dipegang oleh penulis.

⁷¹ UNICEF Ukraina, *The Children of the Contact Line in East Ukraine: An Assessment of the Situation of Children and Their Families Living in Government-Controlled Areas Along the Contact Line in the East Ukraine Conflict Zone*, Juni 2017, halaman 3, 14, dapat diakses di: www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/children_of_the_contact_line.pdf.

⁷² OCHA, *Ukraine Humanitarian Needs Overview 2018*, Desember 2017, halaman 3, 37, dapat diakses di: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/humanitarian_needs_overview_2018_en_20171130.pdf.

program ini dinamai program Sekolah yang Lebih Aman (*Safer Schools*)⁷³ dan diperluas ke sekolah-sekolah di lima kantor ICRC sepanjang lebih dari 450 km garis kontak.⁷⁴

Seperti yang akan terlihat di bawah ini, program tersebut, yang masih berjalan hingga saat ini (*ketika artikel ini disusun pada 2018*), menjadikan pelibatan masyarakat sebagai pusatnya dan bersifat multidisiplin, yang melibatkan sebagian besar departemen operasional sub-delegasi, termasuk Pelindungan, Kesehatan, Kontaminasi Senjata, Air dan Habitat, Ketahanan Ekonomi, dan Kesehatan Mental dan Dukungan Psikososial.

Pada musim panas 2015, ketika program dimulai, sekolah-sekolah di dekat garis depan, baik di wilayah yang dikendalikan pemerintah maupun non-pemerintah, mengalami kerusakan parah – dinding dan atapnya berlubang, jendelanya pecah, dan sistem pemanas dan pasokan air hancur. Sementara beberapa sekolah berhasil dibuka kembali pada waktunya untuk tahun ajaran 2015, yang lain belum bisa memulai tahun ajaran baru. Seperti yang dikatakan ibu dari seorang siswa dari Marinka, wilayah Donetsk: “Kami sangat khawatir dengan anak-anak kami, tetapi kami tidak bisa pergi kemana-mana, seluruh keluarga kami ada di sini. Sekolah adalah satu-satunya hal yang membuat kami terus maju.”⁷⁵

Pada bulan Agustus 2015, ICRC menyelenggarakan beberapa focus group discussion dengan komunitas sekolah – yaitu, para direktur, guru, siswa dan orang tua mereka – di enam sekolah di provinsi Luhansk. Dialog langsung dengan masyarakat yang terdampak ini, yang mana penting untuk pendekatan berbasis masyarakat, merupakan inti dari respons ICRC karena memperkuat pemahaman organisasi ini tentang tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan ancaman yang mereka hadapi, dan cara masyarakat merespons tantangan keamanan yang mempengaruhi sekolah di sepanjang garis kontak.

Isu yang diangkat selama diskusi termasuk dekatnya sekolah dengan posisi militer, akses ke ruang aman, prosedur evakuasi, kapasitas pertolongan pertama, rute yang digunakan oleh anak-anak ke dan dari sekolah, dan akses ke dukungan psikososial.

Diskusi juga mengungkapkan bahwa anggota masyarakat, termasuk anak-anak, mengetahui daerah mana di desa mereka dan jam berapa di siang hari yang paling berbahaya. Anggota masyarakat melaporkan bahwa mereka sudah familiar dengan tanda-tanda peringatan akan

⁷³ Program Sekolah Aman ICRC di Ukraina bagian timur tidak sama dengan inisiatif Pedoman Sekolah Aman yang dipimpin oleh GCPEA dan diuraikan sebelumnya dalam artikel ini.

⁷⁴ Untuk rincian tahap awal program, lihat ICRC, “ICRC Support to Schools and Kindergartens – Eastern Ukraine”, dapat diakses di: <https://tinyurl.com/yboh9xm8>.

⁷⁵ *Ibid.*

datangnya tembakan, dan bahwa mereka telah belajar untuk mendeteksi jarak dan arah tembakan.

Sejalan dengan ini, pada bulan Juli dan Agustus 2015 ICRC melakukan asesmen resiko atas sekitar tujuh puluh tujuh sekolah dan Taman Kanak-kanak di daerah yang dikendalikan pemerintah di provinsi Luhansk dan Donetsk, termasuk sembilan sekolah yang tidak lagi beroperasi. Asesmen tersebut mempertimbangkan sejarah insiden (misalnya, terakhir kali sekolah diduduki oleh aktor bersenjata, atau mengalami penembakan), kerusakan (dan perlu perbaikan), kedekatan dengan posisi militer, dan keberadaan sisa-sisa bahan peledak perang di daerah tersebut. Dalam beberapa kasus, asesmen juga mendokumentasikan jumlah siswa yang terdaftar sebelum konflik dan pada saat asesmen, serta jumlah waktu para siswa bisa hadir di sekolah.

Dari enam puluh delapan sekolah yang masih beroperasi hingga September 2015, asesmen risiko mengklasifikasikan tiga puluh empat sebagai sekolah berisiko tinggi karena lokasinya di area garis kontak, kerentanan terhadap penembakan, riwayat serangan langsung dan/atau kehadiran militer di sekitar mereka. Dua puluh sekolah dianggap berisiko sedang – yaitu, kurang rentan terhadap penembakan dan/atau tidak mengalami penembakan dalam tiga bulan terakhir, dan/atau kehadiran militer dalam jarak 1 sampai 5 km dari tempat mereka (yaitu, tidak langsung sekitarnya).

Informasi yang dikumpulkan melalui diskusi kelompok dan asesmen risiko menjadi dasar bagi ICRC untuk memulai apa yang kemudian dikenal sebagai program Sekolah yang Lebih Aman di Ukraina, pada September 2015.

Paragraf-paragraf di bawah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang kegiatan berbasis masyarakat yang menjadi bagian dari program Sekolah yang Lebih Aman.⁷⁶ Namun, pembaca harus ingat bahwa meskipun program ini dilaksanakan secara luas, kegiatannya disesuaikan dengan masalah dan tantangan masing-masing sekolah. Seperti yang dijelaskan oleh Christophe Gravend, kepala kantor ICRC di Sieverodonetsk: “Bersama dengan ahli kami, para orang tua, anak-anak dan sekolah membuat rencana mereka sendiri untuk memperkuat keselamatan dan kesejahteraan siswa.”⁷⁷

⁷⁶ Pemahaman detil penulis tentang program ini bersumber pada laporan internal dan misi dukungan dari penasihat pendidikan ICRC untuk delegasi di Ukraina. Ini memungkinkan dilakukan kategorisasi kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: (1) rehabilitasi sekolah; (2) pendidikan risiko ranjau dan kesadaran risiko; (3) latihan evakuasi; (4) pemberian bantuan untuk kesiapsiagaan darurat; (5) pelatihan pertolongan pertama; dan (6) asesmen dan dukungan psikososial bagi guru. Ini adalah dimensi program yang dieksplorasi dalam paragraf-paragraf di bawah ini.

⁷⁷ Lihat ICRC, catatan kaki 74 di atas.

Salah satu kegiatan dari program ini yang paling banyak dilaksanakan adalah rehabilitasi sekolah.⁷⁸ Dalam hal kegiatan berbasis masyarakat ICRC, ini terkait dengan penguatan keamanan pasif – yaitu, adaptasi ruang demi kepentingan keselamatan. Rehabilitasi sekolah terdiri dari upaya perbaikan kerusakan fasilitas pendidikan dan/atau penguatan struktur bangunannya, untuk mencegah cedera dan kerusakan lebih lanjut. Untuk mewujudkan hal ini, ICRC menyumbangkan bahan bangunan dan anti air sehingga masyarakat yang terdampak dapat melakukan perbaikan sendiri – hanya pada satu kesempatan ICRC melakukan perbaikan sendiri, yaitu pintu masuk ke tempat pelindungan dari bom di sebuah sekolah. ICRC juga telah melakukan pekerjaan rehabilitasi sistem air dan limbah di beberapa sekolah.⁷⁹

Rehabilitasi sekolah juga melibatkan bantuan peralatan dasar, seperti karung pasir, untuk penguatan jendela. ICRC juga telah menyediakan dan memasang, dalam beberapa kasus bersama Palang Merah Ukraina, plastik film pengaman untuk mencegah jendela pecah, jika penembakan terjadi.⁸⁰

Dalam dimensi ini dari program tersebut, masyarakat dilibatkan tidak hanya dengan melakukan perbaikan sendiri, tetapi juga menentukan bagaimana rehabilitasi sekolah dilakukan. Misalnya, beberapa sekolah enggan jendelanya diperkuat dengan karung pasir, yang mana sebagai perlengkapan militer, karung pasir tampaknya tidak sesuai dengan suasana sekolah. Untuk alasan ini, di sebelas sekolah ICRC melengkapi jendela dengan panel khusus, yang terbuat dari beberapa lapis potongan kayu lapis dan logam, untuk melindungi siswa dari pecahan peluru.⁸¹ Berbeda dengan karung pasir, meskipun hanya sebagai pelindung, panel memungkinkan cahaya matahari masuk ke ruang kelas dan tidak terlihat seperti peralatan militer, dan dapat dicat dan didekorasi, yang memungkinkan untuk lebih cocok dengan lingkungan sekolah.⁸²

Selain rehabilitasi sekolah, program ini berupaya untuk mengurangi paparan komunitas sekolah dari risiko dengan mempromosikan perilaku aman. Untuk itu, ICRC dan Palang Merah Ukraina mengadakan sesi pendidikan risiko ranjau dan kesadaran risiko dengan komunitas sekolah. Guru dilatih untuk mengenali dan mengelola risiko yang ditimbulkan oleh sisa-sisa bahan peledak perang, dan anak-anak mendapat komik yang didesain secara khusus untuk

⁷⁸ Lihat catatan kaki 76 di atas.

⁷⁹ Lihat catatan kaki 76 di atas.

⁸⁰ Lihat ICRC, "Ukraine: ICRC Helps Schools Affected by Conflict", 6 Januari 2016, dapat diakses di: www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=6KVUdjnFoW4.

⁸¹ ICRC, catatan kaki 74 di atas.

⁸² Sekolah di Novotoshkivske adalah contoh di mana panel-panel khusus dipergunakan. Lihat *ibid*.

mereka, yang menjelaskan bahaya kontaminasi senjata dan memberikan nasihat tentang perilaku aman.⁸³

Promosi perilaku aman juga mencakup pelatihan anak-anak dan staf sekolah tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi penembakan, tidak hanya di sekolah tetapi juga di sepanjang rute sekolah. Seperti yang dikatakan ibu dari seorang siswa, "Tempat paling berbahaya adalah jalan menuju sekolah....Saya selalu berjalan dengan anak saya ke sekolah dan menjemputnya pulang. Jika penembakan atau pengeboman dimulai, saya bisa menutupi dia dengan badan saya."⁸⁴

Untuk memastikan keamanan komunitas sekolah jika terjadi penembakan atau pengeboman, ICRC juga merevisi latihan evakuasi sekolah. Beberapa komunitas menyuarakan permasalahan bahwa evakuasi dapat berlangsung dengan cara yang tidak direncanakan. Sebagian besar jalur evakuasi ke ruang aman terpapar risiko, baik karena pintu masuk ke ruang bawah tanah (yang paling sering berfungsi sebagai ruang aman) terletak di luar sekolah, ataupun karena jendela luar yang besar di jalur evakuasi.

Sebagai respons, ICRC mengusulkan langkah-langkah untuk membuat rute evakuasi lebih aman (seperti menambahkan pegangan tangan ke tangga dan langkah-langkah anti-selip lainnya), atau menyarankan rute evakuasi alternatif. ICRC juga berdiskusi dengan masyarakat bagaimana sinyal peringatan dapat diintegrasikan ke dalam rencana evakuasi, yang pada gilirannya dapat memberikan kerangka kerja standar bagi kepala sekolah untuk membuat keputusan apakah akan memerintahkan evakuasi.

Program Sekolah yang Lebih Aman juga bertujuan untuk membantu komunitas sekolah bersiap menghadapi kemungkinan keadaan darurat, yang telah diterjemahkan ke dalam pemberian bantuan langsung ke sekolah dan taman kanak-kanak. Sekolah menerima kasur, selimut, terpal, pemadam kebakaran, senter, lampu, ember, jerigen dan/atau persediaan makanan yang tidak cepat rusak, seperti biskuit dan kacang-kacangan. Bahan-bahan ini digunakan untuk menjadi pelengkap ruang bawah tanah mereka, jika siswa dan staf sekolah harus berlindung untuk jangka waktu yang lama. Dalam beberapa kasus, bantuan yang diberikan juga termasuk air dan peralatan pemanas.⁸⁵

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

Selain itu, Palang Merah Ukraina memberikan pelatihan pertolongan pertama kepada guru, dan kadang-kadang kepada siswa, dan ICRC mendistribusikan perban yang dapat digunakan untuk merawat yang terluka selama keadaan darurat.⁸⁶

Dengan mengkombinasikan pelatihan dengan bantuan langsung, ICRC, melalui kemitraan dengan Palang Merah Ukraina, telah berupaya membangun kemampuan dan kapasitas komunitas sekolah untuk merespons keadaan darurat di masa mendatang. Ini adalah pendekatan efektif karena dibangun di atas strategi pelindungan masyarakat yang sudah ada, mengakui aksi khusus mereka dan memastikan kepemilikan mereka atas program tersebut.

Meskipun demikian, karena keterpaparan mereka terhadap konflik dari waktu ke waktu, anggota masyarakat mengalami tingkat stres yang luar biasa tinggi. Masyarakat juga melaporkan bahwa anak-anak mengalami ketakutan dengan pengeboman dan menyoroti perlunya dukungan psikososial tambahan. Dengan demikian, setelah asesmen kebutuhan psikososial, guru sekolah yang berpartisipasi dalam program Sekolah yang Lebih Aman mendapatkan manfaat dari inisiatif ICRC yang terkait, yang disebut “menolong para penolong” (*helping the helpers*). Dalam kegiatan ini, ICRC memberikan dukungan psikososial kepada para guru dan melatih mereka dalam memberikan dukungan semacam itu kepada siswa, yang membantu mereka mengatasi stres siswa dan juga stres mereka sendiri.⁸⁷

Sejalan dengan kegiatan-kegiatan di bawah program Sekolah yang Lebih Aman, kehadiran ICRC di Ukraina terus melibatkan pihak berwenang dan pemegang senjata dalam dialog pelindungan yang dibahas di atas. Meskipun tidak terfokus pada masyarakat, upaya-upaya yang berpusat pada otoritas tersebut menjadi pelengkap pelindungan berbasis masyarakat dan relevan dalam konteks di mana sekolah-sekolah dan komunitas sekolah dihadapkan pada risiko yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata. Dialog ICRC dengan pihak berwenang bertujuan untuk memastikan bahwa sekolah dihormati dan dilindungi dari dampak perrusuhan dan agar posisi militer tidak dekat dengan sekolah, yang akan menempatkan mereka dalam risiko kerusakan insidental.

Keunggulan dan tantangan

Keunggulan utama program berbasis masyarakat yang ditujukan untuk mengurangi dampak konflik di sekolah adalah keterlibatan masyarakat. Dalam program Sekolah yang Lebih Aman,

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

dialog dengan masyarakat menjadi kunci tidak hanya selama tahap awal, ketika komunitas sekolah membantu ICRC untuk memahami tantangan yang mereka hadapi, tetapi juga selama pelaksanaan program. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memiliki suara untuk menentukan bagaimana merespons kebutuhan mereka, yang pada gilirannya memungkinkan untuk mengangkat permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak diperhatikan, seperti dampak penggunaan peralatan khusus untuk memperkuat struktur sekolah terhadap atmosfer sekolah. Partisipasi masyarakat tersebut juga penting untuk memastikan bahwa respons kemanusiaan yang diterima masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka, yang mana sangat relevan dengan program-program, seperti Sekolah yang Lebih Aman, yang dilaksanakan di berbagai lokasi di suatu wilayah. Semua ini mencerminkan pandangan ICRC bahwa masyarakat "adalah 'ahli' dari situasi mereka sendiri".⁸⁸

Kemitraan dengan Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (Perhimpunan Nasional) juga telah menjadi dasar dalam program berbasis masyarakat ICRC di sekolah-sekolah, tidak hanya di Ukraina tetapi juga di Lebanon dan Amerika Latin. Dalam contoh program Sekolah yang Lebih Aman yang dibahas di atas, Palang Merah Ukraina adalah aktor kunci dalam kegiatan yang dilakukan langsung dengan masyarakat, seperti pendidikan risiko ranjau dan pelatihan pertolongan pertama. Perhimpunan Nasional adalah aset berharga dalam respons ICRC di sekolah, karena kedekatan mereka dengan masyarakat dan keahlian khusus mereka dalam pertolongan pertama dan pengurangan risiko bencana, yang pasti berperan dalam pendidikan risiko ranjau dan promosi perilaku aman di sekolah. Selanjutnya, sistematisasi prosedur keselamatan yang akan diadopsi oleh komunitas sekolah untuk mengurangi konsekuensi dari kemungkinan insiden keamanan pada awalnya terinspirasi oleh Safer Access (*Akses yang Lebih Aman*), seperangkat pedoman yang dibuat ICRC bagi Perhimpunan Nasional untuk melaksanakan pekerjaan mereka dalam konteks yang sensitif dan tidak aman.

Terakhir, seperti yang disebutkan di atas, program-program berbasis komunitas ICRC kaya akan sifat multidisiplinnya, yang dibangun di atas berbagai keahlian dalam organisasi. Seperti yang terlihat dalam program Sekolah yang Lebih Aman, ICRC mampu menawarkan respons holistik terhadap tantangan pelindungan yang dihadapi oleh komunitas sekolah di Ukraina, yang memungkinkannya untuk memperkuat ketahanan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap keadaan darurat; memberikan dukungan, termasuk psikososial, untuk mengurangi konsekuensi konflik bersenjata; dan memperkuat struktur gedung sekolah dan fasilitas pendidikan lainnya.

⁸⁸ A. Cotroneo dan M. Pawlak, catatan kaki 69 di atas, halaman 36.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh program berbasis masyarakat adalah risiko kehilangan sifatnya yang berbasis masyarakat – terutama ketika dilaksanakan di beberapa lokasi di wilayah yang sama. Setelah konsultasi dilakukan dan kegiatan mulai dilaksanakan di beberapa komunitas pertama, pekerja lapangan mungkin mulai merasa bahwa mereka sudah mengetahui masalah di area tersebut, yang pada gilirannya dapat menyebabkan dialog yang kurang melibatkan komunitas tambahan untuk diikutsertakan dalam program.

Akan tetapi, sangat penting bahwa para pekerja kemanusiaan terus melibatkan komunitas dengan “halaman kosong” – yaitu, tidak membuat asumsi, yang merefleksikan pemahaman bahwa setiap komunitas baru bersifat unik. Terlepas dari seberapa mirip konteksnya, masyarakat mungkin melihat situasi mereka dengan cara berbeda, melihat masalah yang mereka hadapi secara berbeda, menetapkan prioritas yang berbeda untuk kebutuhan dan tantangan mereka, dan memiliki pendapat berbeda tentang strategi respons yang diadopsi. Mengadopsi pendekatan “halaman kosong” membuat pintu tetap terbuka untuk kegiatan tambahan yang akan dirancang dan dimasukkan dalam program, dan untuk perbaikan atas yang sudah ada.

Hal ini juga berlaku untuk pelajaran yang didapat dari program Sekolah yang Lebih Aman. Sementara penulis berharap praktik yang dibahas di atas dapat memberikan inspirasi bagi organisasi kemanusiaan yang bekerja di bidang pendidikan, atau hanya pada pelindungan berbasis komunitas, esensi dari respons berbasis masyarakat tetap merupakan dialog berkelanjutan dengan masyarakat. Oleh karena itu, bukanlah maksud penulis untuk memberikan pendekatan standar guna memastikan pelindungan pendidikan selama konflik bersenjata yang dapat direplikasi dalam konteks lain. Setiap respons harus didasarkan pada kebutuhan dan kerentanan, sebagaimana dihasilkan dari asesmen dan didiskusikan dengan komunitas yang berbeda-beda.

Program Sekolah yang Lebih Aman mungkin merupakan contoh yang baik dan komprehensif terkait respons berbasis masyarakat terhadap risiko yang dihadapi oleh sekolah dan fasilitas pendidikan lainnya yang terpapar ke pengeboman dan penembakan. Meskipun demikian, dengan mempertimbangkan permasalahan yang disebutkan di atas, penting untuk mengakui bahwa banyak kegiatan yang dilaksanakan di Ukraina dapat menimbulkan masalah, dan bahkan meningkatkan paparan risiko, dalam konteks di mana sekolah-sekolah digunakan untuk tujuan militer.

Rehabilitasi struktur sekolah dan pemberian bantuan material untuk melengkapi ruang bawah tanah sekolah untuk keadaan darurat di masa mendatang dapat membuat sekolah lebih menarik bagi angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata untuk digunakan sebagai pangkalan, barak dan tempat penampungan sementara, atau untuk tujuan militer lainnya. Dalam kasus lebih spesifik program Sekolah yang Lebih Aman, keadaannya lebih baik untuk rehabilitasi sekolah dan kegiatan kesiapsiagaan darurat karena pada saat program dimulai, proses gencatan senjata telah dimulai, di mana penekanan diberikan untuk tidak menggunakan sekolah untuk tujuan militer. Namun, bahkan dalam konteks di mana sekolah tidak digunakan untuk tujuan militer, dialog berkelanjutan dengan pihak berwenang dan pemegang senjata diperlukan untuk memastikan bahwa posisi militer tidak dekat dengan sekolah, seperti yang terlihat di atas.

Tantangan terakhir ada pada fakta bahwa program semacam itu mungkin memberikan rasa pelindungan palsu kepada masyarakat yang terdampak, dan mendorong orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah yang meskipun langkah-lengkah pelindungan telah diterapkan, sekolah tersebut masih terpapar ke risiko. Oleh karena itu, penting bahwa sebelum melaksanakan kegiatan, asesmen risiko yang tepat sudah dilakukan, untuk mengevaluasi apakah kegiatan yang direncanakan (atau bahkan mekanisme yang telah diadopsi oleh masyarakat) dapat menjadi respons yang efektif. Mempertahankan dialog pelindungan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik adalah kunci dalam hal ini, karena berkontribusi untuk memastikan keamanan dari dan di sekitar sekolah.

Penutup

Artikel ini berusaha untuk membedakan antara pendekatan-pendekatan berbeda terhadap pendidikan yang telah mengemuka di bidang kemanusiaan. Artikel ini berusaha untuk menunjukkan bahwa, sementara EiE terutama terkait dengan respons yang mengatasi kesenjangan dalam akses ke pendidikan, sub-sektor tersebut juga berfokus pada merespons kebutuhan untuk melindungi pendidikan. Bidang terakhir ini dari respons program menjadi pelengkap upaya yang berorientasi pada advokasi dan berpusat pada otoritas untuk memastikan pelindungan pendidikan dari serangan yang terkait dengan agenda internasional PBB untuk anak-anak dan Deklarasi Sekolah Aman (dan Pedoman).

Respons ICRC terhadap kebutuhan pendidikan dalam situasi kemanusiaan juga dapat dipahami secara paralel dengan perbedaan antara kesenjangan akses dan pelindungan pendidikan. Dalam hal menjembatani kesenjangan dalam akses ke pendidikan, interaksi ICRC

dengan pihak berwenang didasarkan pada berbagai tanggung jawab dan kewajiban mereka terkait fasilitasi atau penyediaan pendidikan. Berkenaan dengan pelindungan pendidikan, dialog ICRC dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata sangat bergantung pada HHI (serta kerangka dan standar pelengkap jika relevan), dan berfokus pada perilaku permusuhan untuk mencegah atau mengurangi dampak konflik bersenjata terhadap gedung sekolah, siswa dan staf sekolah.

Selain upaya yang berpusat pada otoritas, ICRC juga melibatkan masyarakat di kedua wilayah tersebut. Dalam hal menjembatani kesenjangan dalam akses ke pendidikan, hubungan organisasi ini dengan masyarakat hanya bekerja satu arah, karena didasarkan pada pemberian langsung bantuan material atau layanan lainnya (seperti transfer dokumen dan transportasi siswa). Sebaliknya, dalam upaya memastikan pelindungan pendidikan, ICRC mampu membangun dialog dua arah dengan masyarakat, membangun interaksi yang lebih dalam dan bermakna, seperti yang ditunjukkan oleh program Sekolah yang Lebih Aman di Ukraina.

Ini bukan untuk mengatakan bahwa masyarakat tidak dapat diajak berinteraksi dan terlibat dalam program yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan dalam akses ke pendidikan – ini bukan hanya pendekatan yang nyata dan sudah ada, tetapi juga lumrah dalam konteks yang ditandai dengan kurangnya pilihan pendidikan formal, di mana masyarakat mungkin terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan informal.

Tujuan akhir dari artikel ini adalah untuk berbagi pengalaman ICRC di bidang pendidikan, sambil menekankan potensi hubungan yang menguntungkan antara pendekatan berbasis masyarakat dan pelindungan pendidikan. Meskipun tidak lengkap, penulis berharap praktik dan pemikiran yang dibagikan di atas dapat memberikan informasi tambahan terhadap perkembangan sebuah sektor yang sedang bertumbuh.